

**PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN
DALAM SISTEM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAERAH:
KASUS DI KABUPATEN SIMEULUE - ACEH**

***DEVELOPMENT OF SUB-DISTRICT INTERNET SERVICE CENTER IN
REGIONAL SYSTEMS OF DEVELOPMENT COMMUNICATION:
CASE IN SIMEULUE DISTRICT – ACEH***

Budiman

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jalan Tombak No. 31 Medan (20222)
budi037@kominfo.go.id

Diterima : 29 April 2016

Direvisi : 16 Mei 2016

Disetujui : 10 Juni 2016

ABSTRACT

Infrastructure development is an important part in order to develop an area, especially rural areas. adequate infrastructure could enhance the development of social and economic activities of the society and to encourage public welfare. The success of development should include the participation from the community because participation from the community can gain information about the real conditions, needs and attitudes. The public will trust the program development activities if they are involved in the preparation and planning, because they will know the ins and outs of the program activities and will have a sense of belonging to the program. Then encourage public participation because they feel involved in the development. The reality is the construction of Sub-District Internet Service Center (PLIK) in Indonesia are not optimal, as is the case in the District of Simeulue. To know the problems the authors conducted this study using qualitative methods that will learn about the development process and uncover the problems that occurred in Simeulue PLIK development, so that the data obtained can be considered for evaluation or development in the future. Development PLIK Simeulue face obstacles that relates to the choice of location is less precise, mentoring poor, lack of computer knowledge society, and the lack of ICT training for communities as well as inadequate infrastructure, so that the program PLIK of Ministry Of ICT in Simeulue is not maximized and not right target.

Keywords: *Communications Systems, Regional Development, District Internet Service Center, Simeulue*

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam upaya pembangunan dan pengembangan wilayah, utamanya wilayah perdesaan. infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, sehingga lebih mendorong kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sumber memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan bila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Kemudian mendorong partisipasi umum karena masyarakat merasa dilibatkan dalam pembangunan. Realitasnya pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di

Indonesia banyak yang tidak maksimal, seperti halnya di Kabupaten Simeulue. Untuk mengetahui permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang akan mengkaji tentang proses pembangunan dan mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembangunan PLIK di Kabupaten Simeulue, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi ataupun pengembangan dimasa yang akan datang. Pembangunan PLIK di Kabupaten Simeulue menghadapi kendala yakni berkaitan dengan pemilihan lokasi yang kurang tepat, pendampingan yang kurang baik, lemahnya pengetahuan komputer masyarakat, dan kurangnya pelatihan TIK untuk masyarakat serta infrastruktur yang belum memadai, sehingga program PLIK dari Kemenkominfo di Kabupaten Simeulue belum maksimal dan tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Sistem Komunikasi, Pembangunan Daerah, Pusat Layanan Internet Kecamatan, Kabupaten Simeulue

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang berlangsung melalui proses-proses komunikasi, maka konsep modernisasi tersebut akan berkaitan dengan perspektif komunikasi. Pembangunan merupakan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi. Bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir' sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995).

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Dalam konteks ini pembangunan diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Sebab seperti diketahui, setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini diperlukan suatu perencanaan. Soemardjan dan Soemardi (1974) menyatakan bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak

yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.

Indonesia secara politis telah melewati tiga orde kepemimpinan nasional, mulai dari orde lama, orde baru, dan orde reformasi, yang memiliki dinamikanya masing-masing. Jumlah masyarakat miskin semakin tahun semakin bertambah besar. Jumlah penduduk miskin pada September 2013 (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen). Selama periode Maret–September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30 juta orang (dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013). Sementara itu di daerah perdesaan naik sebanyak 0,18 juta orang (dari 17,74 juta orang pada Maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013) (BPS, 2014).

Fenomena kemiskinan di daerah perdesaan dan perkotaan melahirkan kritik terhadap paradigma pembangunan yang selama ini berlangsung. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan mengabaikan multikulturalisme yang menyebabkan potensi

basis-basis lokal kurang diperhitungkan. Proses ini, salah satunya berakibat pada tingkat pendidikan dan akan mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi daya beli bahkan tingkat akses yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Kondisi ini secara masif membentuk kesenjangan digital di daerah-daerah. Kesenjangan digital (*digital divide*) telah memisahkan banyak orang yang terhubung pada revolusi digital dalam ICT dengan orang-orang yang tidak memiliki akses pada kelebihan teknologi baru ini (http://www.itu.int/wsis/basic/faqs_answer.asp?lang=en&faq_id=102).

Kesenjangan digital dapat dipahami sebagai ketimpangan antara masyarakat yang mengakses teknologi informasi digital secara efektif dengan yang tidak mengakses sama sekali. Biasanya mencakup pengaksesan teknologi secara fisik, dan secara luas kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang tersedia untuk digunakan.

Fenomena tersebut merupakan indikasi perencanaan pembangunan yang tersentralistik. Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh kurang tanggapnya birokrasi terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan semangat masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar. Agar pembangunan masyarakat perdesaan berhasil, segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat perdesaan itu sendiri. Ini karena pada dasarnya merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Selain itu, mereka juga yang nantinya memanfaatkan

dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Ada tiga alasan utama melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Conyers, 1981). Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Pada bagian lain, untuk mengatasi kesenjangan dan mengurangi kemiskinan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menyarankan pembenahan beberapa hal penting. Pertama, adalah memperbaiki kesenjangan dengan pembangunan infrastruktur dasar sanitasi, kemiskinan, jalan serta jembatan, yang harus segera diselesaikan. Pembangunan ini untuk menghindari *gap* yang besar dalam kesenjangan kemiskinan. (<http://ekbis.sindonews.com/read/2014/01/02/34/823037/tekan-kemiskinan-infrastruktur-dasar-harus-ditingkatkan>).

Pembangunan prasarana atau infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam upaya pembangunan dan pengembangan wilayah, utamanya wilayah perdesaan. Karena tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat (Jayadinata, 1999), sehingga lebih mendorong kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dengan kondisi sosial

ekonomi yang baik, masyarakat akan lebih memiliki kemampuan untuk terlibat dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Ini memberikan gambaran bahwa infrastruktur merupakan aset fisik yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak berfungsi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat (Kodoatie, 2005), yaitu terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan wilayah dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan prasarana yang memadai jelas menjadi salah satu solusi yang sangat urgen dalam penanggulangan masalah-masalah kawasan pesisir di atas. Tetapi langkah penanggulangan tersebut dihadapkan pada suatu kenyataan, bahwa kemampuan pemerintah dalam penyediaan prasarana perdesaan sangat terbatas, sedang perhatian masyarakat terhadap penyediaan prasarana juga tidak selalu muncul dengan sendirinya. Pemerintah harus terus-menerus mendorong, menggerakkan, bahkan terkadang diperlukan suatu kebijaksanaan melalui peraturan-peraturan yang mengharuskan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Program, ide atau inovasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak selalu mendapat dukungan atau berimbas pada terserapnya partisipasi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi, karakteristik, serta latar belakang masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kebutuhan akan format komunikasi pembangunan yang tepat menjadi sangat relevan. Perlu diterapkan model komunikasi pembangunan yang berbeda, jika memang kondisi, karakteristik dan latar belakang masyarakatnya berbeda.

Tujuan penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pusat Layanan Internet Kecamatan, di Kabupaten Simeulue yakni untuk mengetahui sistem komunikasi yang berkaitan dengan program pembangunan wilayah daerah; dalam level mikro, bentuk jaringan komunikasi yang terbangun dan menunjang program pembangunan; peluang dan kendala dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) serta alternatif solusi permasalahan untuk menjaga kestabilan sistem komunikasi yang terhambat pada tingkat daerah.

Model pembangunan yang mendasarkan pada paradigma manajemen sumberdaya lokal, maka penggalan inisiatif, prakarsa dan kreativitas masyarakat lokal, serta proses pembelajaran sosial (social learning) melalui jaringan koalisi dan komunikasi antarpelaku dan organisasi lokal merupakan karakteristik penting bagi pembangunan yang partisipatif (Tjokrowinoto, 1999). Komunikasi pembangunan adalah bagian integral dari aktivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terutama yang berhubungan dengan proses penyediaan barang-barang publik, termasuk prasarana perdesaan. Penyediaan prasarana bagi pengembangan suatu kawasan sangat penting, karena sebagian besar permasalahan kawasan pemecahannya sangat terkait dengan penyediaan prasarana tersebut. Prasarana merupakan faktor potensial dalam menentukan perkembangan suatu wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pembangunan wilayah tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak memadai (Jayadinata, 1999). Demikian juga dengan peranan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan, pemerintah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi hingga ke masyarakat desa. Program Desa Informasi yang dijalankan oleh pemerintah meliputi, desa berdering (desa yang memiliki telepon), desa pintar (desa punya internet), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), radio komunitas, dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Perluasan pembangunan infrastruktur itu dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara masyarakat desa dan kota. Jika kesenjangan tersebut tidak segera diatasi akan mengganggu kelancaran pembangunan nasional (<http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/143/Data%20Publikasi%20PPI.pdf?sequence=1>).

Hingga Desember 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah membangun sebanyak 32.208 SSL untuk desa di wilayah non-komersial yang dilayani akses telekomunikasi atau dari sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia). Juga telah dibangun sebanyak 1.857 Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK), sebanyak 5.956 Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan sebanyak 1.222 PLIK di pusat-pusat atau sentra produktif. Kemkominfo juga telah membangun 1.330 SLL yang merupakan pengembangan Desa Dering menjadi Desa Pinter. Jumlah desa informasi yang sudah dibangun sebanyak 350 desa (dengan catatan belum dengan radio komunitas). Proyek M-PLIK bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat dan murah. Fungsi dan tujuannya adalah melayani masyarakat umum yang berada di daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas internet. Penyediaan M-PLIK merupakan amanat dari pasal 5

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Penyedia Jasa Akses Internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi internet kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 19/PER/M.KOMINFO/12/2010.

Pembangun Desa Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial serta ekonomi dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, pengembangan wilayah dan masyarakat, dan menjembatani kesenjangan digital. Terintegrasi dengan Desa Berdering antara lain, seperti Desa Pinter, PLIK yang memberikan layanan akses informasi di seluruh kecamatan untuk informasi cuaca, harga komoditas, pendidikan dan kebutuhan lainnya dalam rangka kemudahan informasi bagi masyarakat, Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), dan penyelenggaraan TV *Broadcast* berbasis kebutuhan masyarakat, serta berbagai program pelayanan informasi lainnya (Wahyono, 2011).

Salah satu daerah yang memperoleh program tersebut adalah Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Simeulue, pada 2013 menargetkan seluruh desa di daerah itu memiliki jaringan internet guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi Sistem Komunikasi Indonesia

Hubungan komunikasi dan pembangunan menurut Schramm adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan memerlukan keaktifan masyarakat. Agar masyarakat berpartisipasi, pembangunan harus diinformasikan. Karena itu perlu adanya sarana/saluran informasi dan

pembangunan komunikasi (Nasution, 2002). Pembangunan komunikasi dapat dilakukan melalui suatu perencanaan komunikasi yang dapat mengaktualisasikan pesan pembangunan dengan cara-cara yang dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan (Hancock, 1978). Dengan demikian pembangunan prasarana perdesaan dapat diinterpretasikan suatu sketsa hubungan sebagai berikut:

1. Komunikasi pembangunan sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah (Effendy, 2006). Komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi seluruh warga masyarakat (aparatur pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, LSM, individu atau kelompok/organisasi sosial) untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi melalui proses perubahan terencana demi tercapainya mutu-hidup secara berkesinambungan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih (Mardikanto, 1987).
2. Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan (Nasution, 2002).

Unsur dan proses komunikasi pembangunan menurut Lasswell (dalam Effendy, 2006) mempergunakan model verbal untuk mendefinisikan komunikasi dengan mengatakan, bahwa cara terbaik menjelaskan

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: *who says what in which channel to whom with what effect?* Berdasarkan definisi Lasswell tersebut dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: komunikator (communicator, source, sender, encoder), pesan (message), media (channel), komunikan (Communicant, communicatee, receiver, recipient, decoder), dan efek (effect, impact, influence).

Stakeholders dan agen perubahan komunikasi pembangunan melibatkan *stakeholders* pembangunan, yaitu semua individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan atau program pembangunan (Sumarto, 2004). *Stakeholders* pembangunan di tingkat desa meliputi: pemerintahan desa, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (civil society). Ketiganya komponen tersebut merupakan pelaku komunikasi pembangunan di tingkat desa, dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan prasarana perdesaan.

Pembangunan memerlukan adanya pihak-pihak yang selalu mendorong ke arah perubahan (modernisasi). Menurut *Teori Propensity of Change Lerner* (Nasution, 2002), modernisasi suatu bangsa ditandai terjadinya urbanisasi. Urbanisasi akan meningkatkan melek huruf (literacy), lalu meningkatkan penggunaan media (media participation), selanjutnya akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat (political participation). Sehingga karakteristik masyarakat yang berpotensi menjadi agen-agen perubahan dilingkungannya dapat dilihat dari aspek urbanisasi, pendidikan, akses media dan partisipasi organisasi sosial politik.

Pengembangan model komunikasi pembangunan didasarkan pada pendekatan Manajemen Sumber daya Lokal (Community-Based Resource Manajement), yaitu paradigma pembangunan yang menempatkan peranan individu sebagai pelaku yang turut menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber dan mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka sendiri (Korten, 1984). Paradigma ini memberi tempat yang sangat penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self-reliant communities) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri. Keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan atau pemegang peran pembangunan (stakeholders) dalam suatu komunitas, dan perhatian terhadap keberadaan institusi-institusi lokal, kelompok-kelompok lokal, inisiatif lokal, kapital sosial, kearifan lokal, nilai-nilai tradisi lokal, dan sebagainya menjadi faktor kunci dari pendekatan manajemen sumberdaya lokal (Nugroho & Dahuri, 2004). Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara satu individu dengan individu yang lain. Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus informasi dalam jaringan komunikasi yang membentuk suatu pola komunikasi (Muhammad, 2005). Oleh karena komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan (Nasution, 2002). maka, proses penyebaran informasi yang membentuk pola komunikasi tercermin dalam keseluruhan tahapan komunikasi pembangunan yang sejalan dengan tahapan manajemen pembangunan, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan: perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) (Terry dalam Winardi, 1983). Pada tahap perencanaan, kegiatan komunikasi terkait dengan aktivitas: prakiraan (forecasting), penetapan tujuan (establishing objective), pemograman (programming), penjadwalan (scheduling), penganggaran (budgeting), pengembangan prosedur (developing procedure), serta penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and interpreting policies) atas dasar kondisi yang ada (Allan dalam Siswanto, 2006). Dalam kegiatan perencanaan diperlukan adanya sosialisasi untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran publik, menampung aspirasi dan umpan-balik, serta peningkatan partisipasi warga. Inisiasi merupakan bentuk sosialisasi yang dimaksudkan untuk menghimpun fakta, menjaring inisiatif, berbagi peran atau bersifat konsultatif (Sumarto, 2004). Pendapat Gibson dalam Siswanto menjelaskan tentang kegiatan komunikasi pembangunan pada tahap pengorganisasian terkait dengan aktivitas: pembagian kerja (division of labor), departementalisasi (departementalization), rentang kendali (span of control) dan delegasi (Siswanto, 2006). Pada tahap ini dilakukan pembentukan organisasi proyek, tata kerja dalam melaksanakan proyek, dan personalia proyek (Siagian, 1984). Penggerakan (actuating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok (Winardi, 1983). Dalam konteks pembangunan, maka penggerakan berarti usaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Sedang bentuk partisipasi menurut Sastropetro dapat berupa: pikiran (psychological participation), tenaga (physical participation), keahlian (participation with skill), barang (material participation), uang (money participation)

atau jasa-jasa lainnya (*service participation*) (Sastropetro, 1988). Forum Komunikasi merupakan pola komunikasi menunjuk proses penyebaran informasi pembangunan, maka bagaimana proses penyebaran informasi itu dilakukan tercermin dari saluran yang dipergunakan. Forum komunikasi atau forum warga sebagai suatu forum konsultasi dan penyaluran aspirasi warga untuk urusan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Forum komunikasi dipergunakan untuk merumuskan permasalahan bersama, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi komunitas, sekaligus menjadi media resolusi konflik di tingkat lokal (Sumarto, 2004).

Beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai indikator forum komunikasi di antaranya: Pertama, keikutsertaan warga dan keterbukaan forum. Penyediaan forum komunikasi harus dapat memberi akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat (http://www.ireyogya.org/sutoro/voice_dan_akses_masyarakat.pdf). Kedua, rutinitas dan kohesifitas forum komunikasi. Tidak semua forum komunikasi dapat dijadikan sebagai forum warga yang efektif, sebab forum warga harus memungkinkan rutinitas warga untuk dapat berkonsultasi, berinteraksi dan mencari solusi tentang berbagai masalah publik (Sumarto, 2004). Partisipasi dapat muncul jika terjadi interaksi yang mendorong solidaritas dan

internalisasi norma-norma kelompok, di mana seseorang telah mengidentifikasi dirinya dengan kelompok beserta norma-normanya, sehingga ia mengambil alih sistem norma, termasuk sikap sosial yang dimiliki kelompok (Gerungan, 1991). Keterikatan warga terhadap kelompok (*kohesivitas forum*) juga merupakan indikator penting. Pendapat Pratikto (1987), bahwa akibat adanya identifikasi norma kelompok dan lamanya anggota bergaul dalam kelompok dapat menyebabkan terjadinya kohesivitas kelompok, yaitu kekuatan yang menahan orang untuk tinggal dalam suatu kelompok. Dengan demikian, komunikasi pembangunan akan lebih efektif apabila dapat memanfaatkan kelompok-kelompok lokal sebagai forum komunikasi yang memang telah secara rutin dihadiri oleh warga, dan wargapun memiliki ikatan yang kuat terhadap kelompok tersebut.

Efektivitas komunikasi melekat dengan teknik komunikasi yang dipergunakan. Jika forum komunikasi merupakan saluran bagi penyebaran pesan pembangunan, maka teknik komunikasi adalah cara bagaimana supaya penyebaran pesan pembangunan dapat menimbulkan efek yang diharapkan, sebab fungsi teknik komunikasi yang utama adalah: membangun pengertian atau pemahaman yang sama tentang suatu pesan/informasi. Mulyana (2005); mengarahkan komunikasi pada tujuan komunikasi (*destination*), yaitu terjadinya perubahan pendapat, sikap, atau perilaku ditunjukkan melalui umpan-balik (*feedback*) dari komunikasi (Charnley, 1965).

Beberapa teknik komunikasi yang sesuai dengan kondisi perdesaan dan sangat menentukan efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Agen perubahan merupakan pelaku komunikasi dengan peran-peran tertentu. Peran agen perubahan menunjukkan adanya aspek dinamis dari kedudukan seorang agen perubahan. Peran utama agen perubahan adalah: katalisator yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, pemberi pemecahan persoalan, pembantu proses perubahan: membantu proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi; serta penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Havelock, 1973).
2. Keberadaan agen perubahan dalam kegiatan komunikasi pembangunan sekaligus merupakan komunikator lokal bagi lingkungannya. Model komunikasi dua tahap (*two step flow communications*) menempatkan agen perubahan sebagai pemuka pendapat dalam proses berkomunikasi.

Menurut Susanto (1977a), pada masyarakat tradisional (perdesaan) dependensi terhadap pemuka pendapat khususnya dalam menginterpretasikan isi pesan komunikasi sangat tinggi. Pemuka pendapat adalah pemimpin informal yang tidak selalu memiliki otoritas formal namun sangat berperan dalam membimbing tingkahlaku dan mempengaruhi keputusan masyarakat (Muhammad, 2005). Atas dasar kedua pendapat tersebut, maka keberadaan pemuka pendapat sangat diperlukan dalam mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku (partisipasi) masyarakat.

Adapun fungsi pemuka pendapat diantaranya sebagai: penyaring informasi/ide (*gatekeeper*), penyebar informasi, dan penghalang/pembendung atau pemercepat penyebaran dan penerimaan informasi (Susanto, 1977a). Pemuka pendapat dapat juga dapat menjalankan peranan informasional

berupa: peranan monitor, yaitu memandangi lingkungannya sebagai sumber informasi; peranan penyebar, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat dilingkungannya; Peranan jurubicara yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat di lingkungannya (Effendy, 2006).

Model komunikasi persuasif adalah komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan komunikan, demikian menurut Brembeck dan Howell (1976). Komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis (Rakhmat, 1995). Komunikasi persuasif adalah suatu teknik mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi (Susanto, 1977a).

Teknik komunikasi persuasif dapat dilakukan dengan cara (Kertapati, 1980): penyampaian pesan dengan kata-kata atau simbol-simbol komunikasi yang memberikan asosiasi yang menyenangkan. Cara ini dapat dipergunakan untuk memperoleh penerimaan (*acceptance*), kepercayaan (*confidence*), dukungan (*support*) dan partisipasi masyarakat; *rejection device*, yaitu penyampaian pesan dengan kata-kata atau simbol-simbol komunikasi yang membangkitkan rasa khawatir atau takut (*fear arousing*); *testimonial device*, yaitu pesan/ajakan dilakukan dengan cara mensitir, kata-kata, pendapat orang-orang yang terkenal, atau dalil-dalil penguat; *bandwagon device*, yaitu persuasi dengan cara menyediakan suporter atau tukang tepuk.

Selain itu, pesan pembangunan dapat diterima oleh masyarakat apabila ada harapan akan memperoleh manfaat (*expectation of reward*) (Susanto, 1977a), dan sesuai dengan

Dissonance Reduction Theory, manusia tidak menyukai adanya perbedaan/pertentangan antara norma-norma dalam dirinya dan ia akan menerima pendapat yang dapat mengurangi ketegangan atau pertentangan norma dalam dirinya (Susanto, 1977b).

Komunikasi dua arah dapat dilakukan dengan cara menjaring aspirasi atau masukan publik dengan mengadakan konsultasi publik (Sumarto, 2004), yaitu suatu metode untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu isu antara pemerintah dan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan. Dengan konsultasi publik diharapkan terbangun dukungan dari masyarakat terhadap program pembangunan yang diusulkan. Dalam proses konsultasi akan terjadi proses saling mendengar antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan pelaksana pembangunan memiliki kesempatan untuk mendengar dan melihat kenyataan di masyarakat setempat.

Model komunikasi deliberatif prasarana perdesaan adalah barang publik yang dalam penyediaannya membutuhkan adanya keputusan publik. Karenanya keputusan publik sangat terkait dengan proses berdemokrasi, maka pengembangan komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan hendaknya juga memperhatikan bagaimana tipologi berdemokrasi yang ada di desa. Diamond, Linz, dan Lipset (1990) berpendapat, bahwa demokrasi perwakilan hanya cocok sampai tingkat kabupaten, karena dari segi wilayah dan penduduk, maka gagasan demokrasi menggunakan metode musyawarah tidak mungkin diterapkan. Di desa, karena ukurannya yang masih terjangkau, akan lebih baik mempraktekkan demokrasi partikular yang berbasis komunitarian. Teknik

komunikasi deliberatif menjadi salah satu teknik komunikasi pembangunan yang sangat penting dalam proses penyediaan prasarana di wilayah perdesaan. Oleh Sumarto (2004), teknik komunikasi deliberatif didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang didahului dengan diskusi (musyawarah) tentang alasan dukungan/ penentangan terhadap suatu pandangan.

Perhatian dan partisipasi masyarakat oleh Andersen mengartikan perhatian (*attention*) sebagai suatu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (dalam Rakhmat, 1994). Perhatian sering muncul sesuai dengan kepercayaan, sikap, nilai, dan kepentingan yang dimiliki, sehingga perhatian bersifat sangat selektif (*selective attention*) (Suprpto, 2006). Perhatian sangat mempengaruhi persepsi (Rakhmat, 1994). Perhatian masyarakat terhadap prasarana dilingkungannya sangat terkait bagaimana persepsi sosial (*social perception*) yang mereka miliki, yaitu kecakapan untuk melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan (Gerungan, 1991). Hal inilah yang menyebabkan penerimaan setiap orang terhadap suatu gagasan, ide atau inovasi pembangunan mengalami tahapan yang berlainan. Adanya perhatian merupakan salah satu bentuk dari efek komunikasi yang positif.

Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat. Menurut Librero (1987), ide sentral dalam strategi ini adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi. Yang dipentingkan dalam strategi ini

adalah kemampuan seseorang untuk berpartisipasi yang sama dalam proses bersama. Strategi partisipatif bertujuan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dan bekerja sama. Para praktisi komunikasi pembangunan terus mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan, yakni memperbesar partisipasi penerima manfaat pembangunan. Menurut Serra (1989), kurangnya dukungan dari penduduk lokal dikarenakan, pertama, sulitnya pesan-pesan komunikasi yang dilakukan. Pesan-pesan yang disampaikan ke akar rumput terkesan abstrak. Kedua, pengetahuan dan keterampilan komunikasi dimonopoli elit lokal. Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang perencanaan yang matang dan manajemen. Akibatnya, para agen pembangunan gagal memanfaatkan media-media yang berkembang di masyarakat.

Pada teori kewenangan komunikasi, Barnard dalam Pace dan Fawles (1993) menjelaskan bahwa antara kewenangan dan komunikasi dapat dipadukan melalui teknik-teknik komunikasi baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan. Ketiadaan teknik yang sesuai akan menghilangkan kemungkinan menerima tujuan sebagai suatu dasar organisasi. Sistem komunikasi di tingkat Kabupaten (daerah) akan mengintegrasikan sub-sistem-subsistem komunikasi yang berada di bawah ruang lingkupnya dan meliputi wilayah kewenangan daerah (perdesaan). Berinduk pada supra-sistem komunikasi di wilayah provinsi, maka diharapkan terjadi integrasi elemen komunikasi yang mendukung sistem komunikasi di wilayah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Januari hingga Juni 2013, sementara

pengumpulan data di Kabupaten Simeulue dimulai dari tanggal 8 s/d 15 Maret 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus, yakni berfokus pada satu (atau beberapa) contoh dari fenomena tertentu dengan maksud untuk melakukan penelaahan mendalam tentang sebuah peristiwa, hubungan, pengalaman ataupun proses yang terjadi dalam kasus tersebut. Lebih lanjut lagi, Denscombe memaparkan lima karakteristik studi kasus yang antara lain : menyoroti satu peristiwa, penelaahan mendalam, fokus kepada hubungan antar aspek kasus dan proses, latar alamiah, dan penggunaan beberapa sumber serta metode (Denscombe, 2010). Menurut Denzin dan Lincoln dinyatakan bahwa, salah satu jenis studi kasus, yaitu studi kasus intrinsik. Jenis ini digunakan oleh peneliti untuk memahami sebuah kasus tertentu, dan bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau permasalahan tertentu, namun seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaannya, kasus itu sendiri menarik minat (Denzin dan Lincoln, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang mengelola atau yang terlibat dalam PLIK di Kabupaten Simeulue; Abdul Harris (Koordinator pendistribusian PLIK Kabupaten Simeulue), Amri Isya Syafani (Ketua KSU Karya Sefakat, Kecamatan Simeulue Timur); Juliansyah (Wakil Ketua KUD Karya Muda, Kecamatan Salang); Rizal (Ketua KUD Simeulue Bangun, Kecamatan Simeulue Tengah); Bachtiar Daem (Ketua KUD Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur); Syaminuddin (Ketua KSU Meranti, Kecamatan Simeulue Timur), dan; Pariyoto (Kepala Sekolah SMK-2, Simeulue Timur).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara mendalam,

studi dokumentasi, dan observasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah periset sendiri (Human as an instrument), artinya periset secara langsung melakukan penelitian, mengereasikan sendiri instrumen, baik *interview* ataupun observasi, sehingga kehadiran periset adalah syarat mutlak (Kriyantono, 2006). Instrumen yang digunakan adalah pertanyaan terbuka yang meliputi pengetahuan dan pengalaman informan seputar pembangunan program PLIK di lokasi penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini didahului oleh upaya mengungkap *trustworthiness* dari informan penelitian dengan menguji kebenaran dan kejujuran informan dalam mengungkap realitas. *Trustworthiness* ini diuji melalui pengujian: *credibility informan*, dengan menguji jawaban-jawaban pertanyaan berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka yang khas. Berikutnya adalah menguji *authenticity*, yaitu peneliti memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail (Kriyantono, 2006). Sementara teknik analisis data di lapangan menggunakan model interaktif. Dalam model analisis ini terdapat 3 komponen analisis, yaitu: reduksi data, salinan data, dan penarikan kesimpulan menggunakan Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005). Selanjutnya untuk pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi, setiap sumber data tersebut disalingsilangkan agar data yang diperoleh dapat dipercaya (valid) dan sesuai dengan kebutuhan (reliabel) dan metode yang dipergunakan adalah triangulasi, yaitu menurut Golafshani metode yang menggunakan beberapa sumber data untuk mencapai konvergensi data sehingga mencapai data yang valid (Golafshani, 2003). Secara khusus,

Lincoln dan Guba, menyebut reabilitas di dalam penelitian kualitatif dipenuhi melalui kredibilitas (*credibility*) partisipan, konsistensi (*consistent*) dan transferabilitas (*transferability*) temuan. Sedangkan validitas dapat dicapai melalui kualitas (*quality*) data, ketepatan (*rigor*) dan kejujuran (*trustworthiness*) pengungkapannya (Lincoln dan Guba, 1985)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem komunikasi di level daerah (Kabupaten Simeulue) dengan penggunaan TIK merupakan bagian dari perkembangan teknologi komunikasi. Sebagaimana konsep sistem yang terdiri atas beberapa sub-sistem yang bekerja untuk totalitas tujuan sistem komunikasi, maka program PLIK merupakan determinasi sistem komunikasi di supra-sistem (pembangunan informasi di tingkat provinsi dan nasional) sesuai dengan semangat Pancasila, UUD'45, otonomi daerah, dan keterbukaan informasi publik. Lingkungan sistem sosial yang menjadi bagian sistem komunikasi pembangunan daerah berkenaan dengan implementasi PLIK adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, PT. Telkom Indonesia, dan mitra pendampingnya. Selain itu warga sebagai pengguna, dan pengelola PLIK. Mereka semua bisa disebut sebagai *stakeholder* dari PLIK. Program pembangunan PLIK belum melibatkan masyarakat tetapi dikelola langsung oleh dinas melalui pihak ketiga, sehingga pola komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak memberikan akses pembelajaran bagi masyarakat untuk menggali inisiatif, kreativitas dan prakarsa lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Program-program tersebut

bersifat *top-down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan wilayah dan masyarakatnya. Akibatnya, pola komunikasi pembangunan sebagaimana tercermin dalam kegiatan-kegiatan forum komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak cukup memberi ruang bagi *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses komunikasi, sejak pada tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Tidak sinerginya subsistem-sub-sistem dalam sistem tersebut membuat proses adopsi teknologi yang diperkenalkan kurang mendapat respon masyarakat. Seperti diketahui dalam sistem proses adopsi, sub-sistem yang ada di dalamnya adalah masyarakat, pemerintah desa, pendamping, dan *opinion leader*. Beberapa sub-sistem masih berorientasi pada *output*, yakni internetisasi desa dengan ukuran target tertentu berdasarkan waktu tertentu pula. Ini dapat dilihat dari awal ketika teknologi diperkenalkan, masyarakat dibiarkan sendiri menggunakan teknologi tersebut tanpa ada tenaga pendamping. Masyarakat yang memiliki persepsi kompleksitas suatu teknologi informasi dibiarkan sehingga persepsi tersebut makin menguat yang berakibat pada apatisme. Dalam pelaksanaannya, PLIK menuai kritik karena penempatan yang cenderung berada di ruas jalan besar, tidak tepat sasaran khalayak karena penggunaannya hanya kalangan tertentu, bahkan satu unit perangkat PLIK di pasang di salah satu SKPD Pemerintahan Kabupaten Simeulue. Penetapan unit PLIK di kabupaten tidak memenuhi asas pemerataan, rendahnya motivasi penggunaan warga desa, rendahnya pengetahuan TIK oleh warga desa, kurangnya pelatihan TIK di kalangan warga perdesaan yang awam komputer, lemahnya

pendampingan pemanfaatan TIK oleh SKPD pemerintah daerah, tidak kuatnya kelembagaan pemerintah yang mendukung program PLIK, dan faktor investasi infrastruktur di kecamatan yang tidak memadai, seperti kurangnya pasokan listrik atau sering terjadi pemadaman listrik seperti di Desa Nasrehe, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, sehingga hanya tinggal dua unit komputer PLIK yang dikelola KUD Karya Muda yang dapat beroperasi.

Faktor-faktor tersebut bisa saling terkait. Rendahnya motivasi dalam menggunakan internet bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang TIK warga desa. Namun ada juga yang justru memiliki pengetahuan tentang internet, mereka juga tidak memanfaatkannya. Seperti yang terjadi di Kampung Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, tetapi hanya efektif berjalan selama 6 bulan saja. Masyarakat menilai fasilitas yang disediakan tidak seperti yang mereka perkirakan. Warga enggan menggunakan, meskipun kualitas perangkat komputer baik namun akses internet dinilai lambat, sistem operasi komputer menggunakan *open source* yang kurang familiar serta ruangan yang tidak menggunakan penyejuk ruangan, sehingga banyak perangkat komputer yang rusak dan pengunjung merasa gerah.

Kemudian kurangnya pengetahuan tersebut bisa disebabkan oleh minimnya pelatihan atau karena faktor lainnya. Maureen (2009) dalam Mulyandari (2010) menyatakan bahwa *cyber extension* berfungsi untuk memperbaiki aksesibilitas penggunaannya. Menurut survei yang dilakukan oleh *the International Society for Horticultural Sciences* (ISHS), terdapat beberapa hambatan dalam mengadopsi TIK oleh pelaku komunikasi khususnya untuk bidang

hortikultura di Srilanka, yaitu: keterbatasan kemampuan; sulitnya akses terhadap pelatihan (training), kesadaran akan manfaat TIK, waktu, biaya dari teknologi yang digunakan, integrasi sistem dan ketersediaan *software*. Partisipasi dari negara-negara maju menekankan pada hambatan: tidak adanya manfaat ekonomi yang dapat dirasakan, tidak memahami nilai lebih dari TIK, tidak cukup memiliki waktu untuk menggunakan teknologi, dan tidak mengetahui bagaimana mengambil manfaat dari penggunaan TIK (Taragola dkk. 2009 dalam Mulyandari, 2010).

Penyebab utama belum optimalnya pencapaian keberhasilan dari tujuan program PLIK, juga bisa disebabkan kurangnya pihak yang memperkenalkan dalam memperhatikan aspek sosial budaya, terutama karena pada realitanya, dalam program ini tidak dilakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Sejak awal terkesan, program ini dijalankan dengan pendekatan determinisme teknologi sehingga kurang memperhatikan partisipasi publik. Akibat kurang adanya partisipasi, maka banyak warga yang tidak mengetahui bahwa di desa mereka telah tersedia jaringan telekomunikasi yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi guna meningkatkan pengetahuan maupun kesejahteraan mereka.

Pada tataran pengambilan keputusan untuk pembangunan PLIK ditemukan bahwa prosesnya masih bersifat *top-down*. Alurnya dapat dijelaskan bahwa keputusan dibuat oleh Pusat dalam hal ini Kemkominfo (sebelumnya Depkominfo), kemudian baru melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, selanjutnya dilaksanakan pemasangan fasilitas dan jaringan telekomunikasi oleh pihak ketiga. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada komunitas yang menjadi sasaran. Dengan begitu PLIK diharapkan bisa berjalan dan

mencapai target yang ditetapkan. Bahkan pada tingkat koordinasi dengan pemangku kepentingan, terutama antar-bidang yang menangani infrastruktur dan yang mengelola ternyata pelaksanaannya kurang intensif dan tepat sasaran. Secara nyata koordinasi dengan mitra strategis di daerah, aparat setempat, dan lembaga publik di tingkat desa memang telah dilakukan, tetapi belum intensif dan kurang ada kontinuitas sehingga terkesan spontan dan insidental. PLIK yang semestinya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat namun akhirnya tidak dipahami karena minimnya sosialisasi. Selain itu koordinasi dan pembinaan di daerah kurang tepat sasaran karena hanya melibatkan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, yang seharusnya adalah Dithubkomintel, Kabupaten Simeulue.

Pemasangan perangkat keras dan jaringan telekomunikasi memang sudah terlaksana dengan baik, tetapi pemilihan lokasi kurang tepat karena tidak melibatkan warga setempat, bahkan tanpa melalui survei yang layak dalam seleksi dan penempatan perangkat. Harus diakui bahwa pelaksanaan program ini kurang sosialisasi. Akibatnya, warga masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama dari program PLIK ternyata banyak yang tidak mengetahui dan kurang merasa memiliki. Keberadaan internet dilingkungannya dan manfaat dari penggunaannya sebaiknya pada tingkat bawah disosialisasikan secara bersama oleh pengelola dan pemerintah desa. Beberapa cara dilakukan untuk membuat warga tertarik mengakses informasi melalui internet. Misalnya pengelola PLIK KUD Sinabang, Simeulue Timur, Bachtiar Daem mengundang para pelajar yang sekolahnya minim fasilitas TIK dan

menjadikan PLIK ini sebagai laboratorium pembelajaran komputer dan internet. Dalam kaitan ini, siswa secara langsung bisa mempraktekan materi pelajaran TIK dan secara interaktif dalam proses pembelajaran tersebut siswa dapat menanyakan kepada instruktur PLIK yakni Pak Hendra, namun karena kondisi ruangan yang kurang memadai, panas dan berdebu, mengakibatkan banyak peralatan komputer yang rusak terbengkalai.

Fenomena yang ada di Kampung Aie, Nasrehe dan Simelue Timur bisa diidentifikasi bahwa salah satu sebab masih kurang optimalnya program tersebut adalah karena kurang diperhatikannya aspek sosial budaya, terutama melakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Lembaga-lembaga sosial desa yang kredibel dan aktif kurang dilibatkan dalam pengelolaan PLIK, sehingga partisipasi warga kurang terasa. Sejak awal pendekatannya terkesan masih atas-bawah, diterminisme teknologi, dan kurang memperhatikan partisipasi publik (Wahyono, 2011). Jadi alih-alih menciptakan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, PLIK dibangun berdasarkan pendekatan dari atas ke bawah. Fenomena ketidaksiapan budaya merupakan indikator diabaikannya suara warga masyarakat. Masyarakat diinisiasi oleh sesuatu yang belum difahaminya. Sementara pada tingkat masyarakat yang melek informasi, masih dihindangi keraguan akan manfaat internet mengingat dampak negatif dari penggunaan internet seperti yang sering mereka dengar. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka ketidakseimbangan sistem komunikasi dan sistem sosial di daerah, dimana pembangunan yang berlangsung di tingkat akar rumput tidak memiliki perekat sosial, sehingga tidak tercapainya tujuan pembangunan program PLIK, karena aktivitas

komunikasi pendukung pembangunan tersebut tidak berjalan dengan optimal, dan sulitnya melakukan evaluasi audit komunikasi di tingkat manajemen pemerintah daerah, karena kurang tepatnya pelaksanaan program PLIK dan koordinasinya. Akibat dari minimnya partisipasi publik, aspek kelembagaan yang seharusnya menjadi pengelola program PLIK kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung diabaikan.

Kembali lagi ke persoalan, bahwa PLIK sebagai suatu program baru yang datang dari pusat, bukan atas inisiatif masyarakat sesungguhnya membutuhkan penanganan ekstra, bahkan seharusnya sebelumnya dilakukan riset sebagai awal pelaksanaan kebijakan. Ada beberapa hal yang penting dilakukan pengelola. Pada tahap pertama, seperti yang dilakukan di Kabupaten Simeulue, masyarakat harus mendapatkan sosialisasi yang memadai untuk mengetahui detail dari program tersebut. Selanjutnya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas telekomunikasi yang telah tersedia pada PLIK untuk tujuan pencerdasan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas ekonomi warga. Untuk sampai ke arah itu, sudah tentu terlebih dahulu perlu dilakukan berbagai pelatihan bagi warga masyarakat. Gambaran ideal itu dapat terwujud jika proses pembangunan PLIK dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang, terutama memerhatikan aspek kelembagaan yang diharapkan menjadi pengelola program PLIK. Dengan kata lain program ini akan berjalan lebih efektif jika terlebih dahulu disiapkan aspek kelembagaannya yang meliputi perumusan tujuan program, struktur organisasi, sumber daya manusia yang akan mengelola (operator), dan sumber pembiayaan yang diharapkan dapat menopang kehidupan organisasi. Tanpa memerhatikan aspek

kelembagaan secara memadai, jangan mengharap tercapainya tujuan PLIK seperti yang dicanangkan pada awalnya. Berdasarkan pelaksanaan program PLIK di beberapa wilayah Kecamatan di Simeulue, dapat dideskripsikan beberapa elemen yang mempengaruhi bagaimana program melekat informasi berbasis TIK bermanfaat bagi warga di perdesaan, yaitu: tingkat pemahaman TIK, dukungan manajemen puncak, investasi TIK, dan dukungan lembaga pemerintah (Endraswari, 2006). Beberapa faktor pendukung keberhasilan program PLIK, perlu diperkuat aktivitas untuk meningkatkan pemahaman aplikasi TIK di Simeulue. Diantaranya adalah tingkat pemahaman TIK, dengan indikator : pemahaman komputer, pemahaman manfaat TIK, dan tingkat pendidikan; dukungan manajemen puncak, dengan indikator : dukungan dana, keterlibatan manajemen, dan partisipasi manajemen; investasi TIK, dengan indikator: investasi *hardware*, investasi *software*, investasi peralatan telekomunikasi; dukungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, dengan indikator: penyediaan sarana dan prasarana listrik-telekomunikasi, penyediaan tenaga ahli, dan pelatihan TIK yang baik.

Pada tingkat sistem di bawah, yakni sistem media internet di perdesaan, terdapat sub-sistem komunikasi interaksional antara warga desa dengan pemanfaatan media internet. Jika sub-sistem komunikasi di tingkat masyarakat desa mengalami ketidakseimbangan, maka beberapa elemen komunikasi yang mendukung seperti sumber informasi, pesan, media, penerima pesan, dan efek penyampaian pesan akan mengalami hambatan di lapangan.

Masyarakat pengguna PLIK di perdesaan dapat mengakses informasi dengan

dukungan koneksi dan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Pemahaman masyarakat terhadap TIK juga menjadi faktor utama keberhasilan literasi TIK. Sehingga umpan balik berupa peningkatan sumber daya manusia warga perdesaan dapat terwujud. Dampak kognisi, afeksi, dan psikomotorik dari publikasi informasi melalui media internet yang serba cepat dan *real time* diharapkan dapat terbentuk dan mendukung sistem lingkungan komunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian hasil dan pembahasan, dapat dipaparkan simpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan program PLIK yang merupakan determinasi program komunikasi pembangunan ditingkat nasional dan direncanakan hingga tingkat daerah dalam beberapa kasus ternyata tidak berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari kondisi awalnya, program yang dicanangkan oleh Kemkominfo berkoordinasi dengan pemerintah daerah, PT.Telkom Indonesia berjalan baik. Namun dalam perjalanannya beberapa fasilitas tidak bisa digunakan oleh beberapa SDM pengelola PLIK di Simeulue.

Pada skala mikro, PLIK menjadi bagian sistem komunikasi di tingkat pembangunan daerah, karena perangkat teknologi komunikasi tersebut diaplikasikan untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Peluang dalam pemanfaatan PLIK sangat besar, karena saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue menghadapi kendala yang muncul berkaitan dengan pemilihan lokasi dan ruangan yang kurang tepat, pendampingan yang kurang baik, lemahnya pengetahuan komputer masyarakat, dan kurangnya pelatihan TIK untuk

masyarakat serta infrastruktur listrik yang belum memadai.

Lemahnya pemanfaatan teknologi tersebut karena lemahnya kelembagaan yang tersedia. Tidak dilakukannya dialog dengan masyarakat ketika teknologi ini diperkenalkan, membuat masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki dari proyek tersebut.

Kurangnya antusiasme masyarakat dalam program ini bisa berakibat pada tingkat partisipasi dalam pembangunan nasional, Ini karena terputusnya akses informasi terutama yang terkait dengan pembangunan nasional.

Agar pelaksanaan pembangunan PLIK dapat berjalan dengan baik, harus dipertimbangkan tentang lokasi pendistribusian program PLIK, bobot informasi, khalayak pengguna, dan pembiayaan. Sehingga proses komunikasi berbasis internet dapat berjalan dengan baik dan mendukung ekologi sistem komunikasi di daerah.

Aspek kelembagaan juga harus diperkuat, antara lain bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada perencanaan sehingga keterlibatan mereka berakibat pada perasaan ikut memiliki dan menjaganya (*sense belonging*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kepala BBPPKI Medan yang telah memfasilitasi penelitian ini, juga kepada Pemkab Simeulue, informan penelitian ini dan Mitra Bestari (Bapak Prof. Syukur Kholil dan Dr. Iskandar Zulkarnaen) yang telah memberikan arahan terhadap penelitian ini sehingga penelitian ini tersusun.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2014). *Profil Kemiskinan di Indonesia*, September 2013. Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2
- Brembeck & Howell, W. S. (1976). *Persuasion: A Mean of Social Influence*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2008). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigm, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Charnley, M. V. (1965). *Reporting*. New York: University of Minnesota.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
- Denscombe, M. (2010). *A Good Research Guide: for Small Scale Social Research Projects*. Edisi Keempat. London: McGraw Hill.
- Denzin, N & Lincoln, Y. (2009). *Handbook of Qualitative Reasearch*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diamond, L., Linz, J., & Lipset, S. M. (eds.), (1990). *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner
- Digital Divide*. http://www.itu.int/wsis/basic/faqs_answer.asp?lang=en&faq_id=102. diakses tanggal 14 Februari 2013.
- Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Gerungan, W.A. (1991). *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Golafshani, N. (2003). *Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research*. The Qualitative Report Vol. 8 (4) December 2003 597-607. <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf>. diakses tanggal 25 Januari 2013.
- Honcock, A. (1977). *Communications Planning for Development: An Operational Framework*. *Seminar Communication Planning*. Kuala Lumpur.
- <http://ekbis.sindonews.com/read/2014/01/02/34/823037/tekan-kemiskinan-infrastruktur-dasar-harus-ditingkatkan>, diakses tanggal 10 Januari 2014.
- <http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/143/Data%20Publikasi%20PPI.pf?sequence=1>, diakses tanggal 10 Januari 2013
- http://www.ireyogya.org/sutoro/voice_dan_akses_masyarakat.pdf.
- http://www.itu.int/wsis/basic/faqs_answer.asp?lang=en&faq_id=102, diakses tanggal 14 Pebruari 2013.
- Jayadinata, J. T. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kertapati, T. (1981). *Bunga Rampai Azas-azas Penerangan dan Komunikasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Korten, D. C. (1984). *The Bureaucrats Can't Do It Alone*, Development Forum, Maret.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Librero, F. (1987). Policy Implications of Communication Research on Rice Production. *Philippines Communication Journal*. Quezon City: University of the Philippines-Diliman, Vol. 3. June 1987.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill, CA: Sage Publications.
- Littlejohn, S. W. (1999). *Theories of Human Communication*, 6thed. Belmont CA: Wadsworth Publishing.
- Mardikanto, T. (1987). *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Muhammad, A. (2005). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyandaria, R. S. H., Sumardjo, Lubis, D. P., & Pandjaitan, N. K., (2010). Analisis Sistem Kerja Cyber Extension Mendukung Peningkatan Keberdayaan Petani Sayuran. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 08, (2), Juli
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Pratikto, R. (1987). *Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Rakhmat, J. (1995). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sastropetro, S. R. A. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin*

- dalam Pembangunan Nasional.*
Bandung: Alumni.
- Siagian, S. P. (1984). *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2006). *Pengantar Manajemen.* Bandung: Bumi Aksara.
- Soemardjan, S & Soemardi, S. (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumardjo, Baga, L., M., & Mulandari, R.S. H., 2009. *Kajian Cyber Extension.* Jakarta: Departemen Pertanian.
- Sumarto, H. Sj. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suprpto, T. (2006). *Pengantar Teori Komunikasi.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Susanto, A. S. (1977). *Komunikasi dalam Teori dan Praktek 2.* Bandung: Bina Cipta.
- Tjokrowinoto, M. (1999). *Pembangunan: Dilema dan Tantangan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyono, S. B. (2011). Optimalisasi Program Desa Informasi Melalui Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Penelitian IPTEK-KOM*, Vol. 13, (2)
- Winardi. (1983). *Asas-asas Manajemen.* Bandung: Alumni.

